

Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP dan Dampaknya terhadap Ketentraman Publik di Kota Bandung

Aprilia Maulidan Hermansyah^{1*)}, Fanny Meilani², Cucu Sukmana³

¹²³ Universitas Pendidikan Indonesia

*Corresponding author, e-mail: maulidanaprilia@gmail.com

Received 2025

Revised 2025

Accepted 2025

Published Online 2025

Abstrak: Program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung merupakan upaya penting dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kenyamanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat. Metode evaluasi yang digunakan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) dan Kirkpatrick untuk memberikan gambaran menyeluruh dari berbagai aspek program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan koordinatif telah memberikan hasil positif, seperti perbaikan kondisi ruang publik dan perubahan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lokasi relokasi yang memadai. Simpulan menyebutkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan zona alternatif yang representatif, serta penguatan kerja sama lintas instansi agar program penertiban dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan penyempurnaan strategi, program ini berpotensi menjadi contoh pengelolaan ketertiban umum yang berbasis partisipasi dan humanisme.

Kata Kunci: Penertiban PKL, Satpol PP, Ketertiban Umum, Ketentraman Publik, Evaluasi Program.

Abstract: The street vendor (PKL) control program by the Bandung City Civil Service Police Unit (Satpol PP) is an important effort in maintaining public order and improving public comfort. This study aims to evaluate the implementation of the program and examine its impact on the community. The evaluation methods used are the CIPP (Context, Input, Process, Product) and Kirkpatrick models to provide a comprehensive picture of various aspects of the program. The evaluation results show that the humanist and coordinative approach has provided positive results, such as improving the condition of public spaces and changing public perceptions of Satpol PP. However, there are still challenges such as limited human resources and adequate relocation locations. The conclusion states the need to increase the capacity of the apparatus, develop representative alternative zones, and strengthen cross-agency cooperation so that the control program can run more effectively and sustainably. With improved strategies, this program has the potential to become an example of public order management based on participation and humanism

Keywords: Street Vendor Control, Satpol PP, Public Order, Public Tranquility, Program Evaluation.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:
Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan
Sby Kode Pos 60213
Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112
E-mail: jpus@unesa.ac.id

Pendahuluan

Ketertiban umum dan ketentraman publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan daerah. Meskipun PKL memberikan kontribusi ekonomi bagi lapisan masyarakat menengah ke bawah, keberadaannya juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti gangguan arus lalu lintas, penurunan estetika kota, serta potensi konflik antar pedagang maupun dengan warga sekitar. Hal ini menjadi fokus utama Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak peraturan daerah dan pemelihara ketertiban umum.

Permasalahan tersebut memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan. Program penertiban PKL dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik, meningkatkan ketertiban, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan koordinasi lintas instansi seperti Dinas Perhubungan, TNI, POLRI, dan aparat kelurahan/kecamatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan seperti resistensi dari para pedagang, kurangnya kesadaran masyarakat akan regulasi, serta keterbatasan sarana prasarana dan kapasitas aparatur.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh efektivitas pelaksanaan program penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Bandung serta dampaknya terhadap ketentraman publik. Evaluasi ini tidak hanya ingin mengetahui sejauh mana tujuan program tercapai, tetapi juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam kerangka teoretis, konsep ketertiban umum merujuk pada kondisi tertata, damai, dan selaras dengan norma hukum yang berlaku, sedangkan ketentraman publik mengacu pada rasa aman, nyaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka. Hubungan keduanya bersifat timbal balik; ketertiban menciptakan suasana yang kondusif, sementara ketentraman publik menjadi prasyarat bagi terciptanya ketertiban. Pendekatan humanis dan koordinatif dalam penertiban PKL menjadi penting agar program tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Selain itu, evaluasi program menggunakan model CIPP (*Context-Input-Process-Product*) dan Kirkpatrick membantu dalam mengukur hasil dari berbagai dimensi, baik dari segi struktur program, proses implementasi, maupun dampak jangka pendek dan menengah terhadap masyarakat dan aparatur.

Melalui pendekatan teori dan praktik ini, evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang capaian, tantangan, dan peluang pengembangan program penertiban PKL di Kota Bandung, sekaligus menjadi referensi bagi kebijakan serupa di wilayah lain.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluasi program untuk mengkaji pelaksanaan program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung serta dampaknya terhadap ketentraman publik. Evaluasi dilakukan berdasarkan model CIPP (*Context-Input-Process-Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dengan tujuan untuk mengevaluasi program dari empat aspek utama: konteks, masukan, proses, dan hasil.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian disusun secara sistematis melalui tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada tahap persiapan, tim evaluator menyusun *Term of Reference* (TOR) sebagai pedoman observasi, mengajukan surat izin observasi ke pihak Program Studi, serta menetapkan jadwal dan rincian kegiatan di lapangan. Selama tahap pelaksanaan, dilakukan observasi langsung di Kantor Satpol PP Kota Bandung, wawancara dengan petugas dan pemangku kebijakan, serta pengumpulan data sekunder terkait rencana kerja, SOP, dan hasil pelaksanaan program. Setelah observasi selesai, tahap refleksi dilakukan melalui analisis temuan, diskusi tim evaluator, dan penyusunan laporan lengkap beserta rekomendasi perbaikan.

Populasi dan Sampel (Sasaran Penelitian)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program penertiban PKL di Kota Bandung, termasuk aparatur Satpol PP, instansi lintas sektor seperti Dinas Perhubungan, TNI, POLRI, Dinas UMKM, serta para Pedagang Kaki Lima yang menjadi sasaran program. Untuk memperoleh data yang representatif, sampel dipilih secara purposif dengan kriteria tertentu, antara lain petugas Satpol PP yang terlibat langsung dalam operasi penertiban, tokoh masyarakat yang memiliki hubungan dengan aktivitas PKL, serta beberapa pedagang yang telah mengalami relokasi atau pembinaan.

Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung tentang kondisi lapangan, aktivitas penertiban, serta interaksi antar pelaku dalam implementasi program. Wawancara mendalam dilakukan dengan pimpinan dan anggota Satpol PP, tokoh masyarakat, serta beberapa pedagang guna mendapatkan informasi subjektif terkait tantangan, strategi, dan dampak program. Dokumentasi mencakup pengumpulan arsip administrasi,

SOP penertiban, laporan hasil operasi, serta media sosial resmi Satpol PP sebagai sumber data komunikasi publik.

Instrumen evaluasi dikembangkan berdasarkan kisi-kisi yang dirancang sesuai dengan indikator model CIPP. Instrumen tersebut meliputi panduan observasi, daftar pertanyaan wawancara, dan format catatan lapangan yang telah divalidasi oleh dosen pembimbing dan pihak Satpol PP.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif yang terorganisir berdasarkan aspek evaluasi (konteks, masukan, proses, hasil). Verifikasi kesimpulan dilakukan melalui triangulasi data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan. Selain itu, hasil evaluasi juga dibandingkan dengan teori-teori terkait ketertiban umum, ketentraman publik, dan manajemen program vokasi guna memberikan interpretasi yang lebih mendalam.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program penertiban PKL serta implikasinya terhadap ketentraman publik di Kota Bandung, sekaligus menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan serupa di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Berikut hasil dan pembahasan dari penelitian ini:

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, diperoleh sejumlah temuan penting yang menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah serta pertanyaan penelitian. Temuan ini diinterpretasikan dalam konteks penerapan teori ketertiban umum dan ketentraman publik, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan ruang kota dan pendekatan partisipatif dalam kebijakan publik.

Efektivitas Pelaksanaan Program Penertiban PKL

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program penertiban PKL telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala operasional. Dengan menggunakan model CIPP (*Context-Input-Process-Product*), ditemukan bahwa program ini memiliki relevansi tinggi terhadap visi Kota Bandung sebagai kota yang tertata rapi dan kondusif. Namun, implementasinya masih dibatasi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Meski demikian, proses penertiban dilakukan secara bertahap sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan melibatkan koordinasi lintas instansi seperti TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, dan UMKM.

Temuan ini mendukung argumen Putra (2017) yang menyatakan bahwa pendekatan humanis dan partisipatif lebih efektif dalam menangani isu ketertiban di ruang publik. Proses edukasi dan relokasi PKL sebelum tindakan represif dilakukan memberikan solusi jangka panjang, bukan hanya sekadar penegakan aturan semata. Hal ini juga selaras dengan konsep ketertiban umum menurut UU No. 23 Tahun 2014, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Respons Masyarakat terhadap Program Penertiban

Seiring perubahan strategi Satpol PP dari pendekatan represif ke humanis, respons masyarakat terhadap program penertiban mulai membaik. Melalui kanal digital dan media sosial, masyarakat dapat lebih mudah mengadukan gangguan ketertiban, dan laporan tersebut ditindaklanjuti secara transparan. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, serta perubahan persepsi negatif terhadap Satpol PP sebagai "penggusur" menjadi aparat yang proaktif dalam menjaga ketentraman publik.

Temuan ini sejalan dengan teori Putnam (2000) tentang modal sosial, di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas informasi dan transparansi layanan. Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi publik membuktikan bahwa pelayanan yang responsif dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warga, serta menciptakan iklim ketentraman yang lebih stabil.

Dampak Program terhadap Ketertiban dan Ketentraman Publik

Program penertiban PKL berdampak langsung pada peningkatan ketertiban umum, terutama dalam hal kelancaran arus lalu lintas dan estetika ruang publik. Titik-titik yang sebelumnya semrawut akibat aktivitas PKL kini lebih rapi dan tertata. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Interpretasi atas temuan ini mengacu pada konsep ketentraman publik menurut LBH Jakarta (2021), yaitu suasana ketenangan yang dirasakan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Program penertiban tidak hanya mengubah kondisi fisik ruang publik, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi sosial dan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban dan ketentraman saling berkorelasi secara timbal balik, di mana ketertiban menjadi fondasi bagi ketentraman, dan ketentraman menjadi prasyarat bagi terciptanya ketertiban yang berkelanjutan.

Integrasi Teori dan Praktik dalam Evaluasi Program

Dalam konteks pendidikan masyarakat, evaluasi ini menegaskan pentingnya integrasi antara teori evaluasi program dengan praktik lapangan. Model CIPP dan Kirkpatrick digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program dari berbagai dimensi—konteks, input, proses, dan produk. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembelajaran vokasional yang relevan dengan dunia kerja harus didasarkan pada pengalaman nyata di lapangan, seperti yang dialami mahasiswa saat terlibat dalam simulasi koordinasi lintas sektor dan analisis dokumen operasional Satpol PP.

Selain itu, temuan ini memperkuat argumentasi Arikunto & Jabar (2010) bahwa evaluasi program tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga memeriksa proses pelaksanaan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan. Rekomendasi penyempurnaan kurikulum berbasis temuan lapangan, seperti modul digital dan pelatihan teknis, menjadi langkah penting dalam mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta instansi pemerintah.

Modifikasi Konsep Pendekatan Humanis dalam Penertiban

Evaluasi ini juga menghasilkan modifikasi terhadap konsep pendekatan humanis dalam penertiban PKL. Jika sebelumnya pendekatan ini lebih fokus pada dialog dan negosiasi, maka dalam praktiknya, pendekatan humanis harus mencakup pula aspek pemberdayaan ekonomi dan sosialisasi regulasi daerah. Relokasi PKL ke lokasi alternatif yang representatif dan dukungan pelatihan usaha menjadi bagian integral dari strategi penertiban yang lebih holistik.

Modifikasi ini sejalan dengan pemikiran Hehamahua (2015) yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat eksklusif, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang terkena dampak kebijakan. Oleh karena itu, program penertiban PKL di Kota Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi contoh baik dalam pengelolaan ketertiban umum yang berbasis partisipasi dan humanisme.

Simpulan

Program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman publik. Pendekatan humanis dan koordinatif yang diterapkan oleh Satpol PP terbukti efektif dalam mengurangi kekacauan di ruang publik serta memperbaiki citra instansi di mata masyarakat. Berdasarkan evaluasi menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), program ini memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan kota, meskipun dalam implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional.

Dari aspek konteks, program ini dirancang untuk menjawab tantangan penataan ruang kota dan penguatan ketertiban sosial. Dalam aspek masukan (*input*), dukungan sarana dan prasarana cukup memadai, meski jumlah personel masih menjadi isu kritis. Pelaksanaan program (*process*) dilakukan secara bertahap sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan melibatkan berbagai instansi, sehingga memberikan hasil nyata berupa kondisi ruang publik yang lebih rapi dan kelancaran arus lalu lintas. Hasil akhir (*product*) menunjukkan adanya perubahan positif pada perilaku dan persepsi masyarakat, tidak hanya dalam hal ketertiban tetapi juga partisipasi aktif warga dalam menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, program penertiban PKL telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan efektivitasnya, dibutuhkan strategi pengembangan yang lebih komprehensif. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan lokasi alternatif yang representatif bagi para pedagang, penguatan sistem informasi berbasis teknologi, serta integrasi pendekatan edukatif dalam setiap aksi penertiban. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar program ini dapat menjadi contoh baik dalam pengelolaan ketertiban umum yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi.

Daftar Rujukan

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little, Brown.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budianto, E., & Wahyuni, D. (2020). Peran Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45–56.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. (2019). *Panduan Evaluasi Program Pendidikan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Hehamahua, A. (2015). Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 45–58.
- Hidayat, A., & Putri, D. (2021). Dampak Pandemi terhadap Sektor Ekonomi Informal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 55–67.
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (3rd ed.). San Francisco: Berrett-Koehler.
- LBH Jakarta. (2021). *Kajian Kritis Operasi Yustisi Satpol PP*. Laporan Internal
- Nugroho, R. (2021). Tantangan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Jurnal Tata Kelola Kota*, 8(3), 201–215.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Permendagri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.
- Prasetyo, A., & Suryadi, H. (2019). Dinamika Usaha Mikro Informal di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Studi Pembangunan*, 17(2), 112-125.
- Prasetyo, B. (2019). *Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Putra, I. M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 45-58.
- Putri, R. A., & Siregar, H. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan Penertiban PKL di DKI Jakarta. *Jurnal Eksekutif*, 17(2), 112-128.
- Rahmawati, L., & Saputra, M. (2022). Urbanisasi dan Perkembangan Ekonomi Informal di Jabodetabek. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 20(2), 123-136.
- Setiawan, B. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Sektor Informal di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Suryadi, M., & Rahayu, T. (2021). Manajemen Keterlibatan Stakeholder dalam Penataan PKL di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(3), 45-60.
- Suryanto. (2018). *Struktur dan Pola Perdagangan Informal di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial UI.
- Susilo, T., & Wulandari, N. (2020). Pengelolaan Ruang Publik dan Dampaknya pada PKL. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 88-101.
- Susanto, D., & Hidayat, M. (2021). Peran PKL dalam Ekonomi Lokal: Studi di Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 67-79.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widodo, J. (2017). *Ekonomi Informal dan Perkembangan Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widodo, J. (2020). Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya: Studi Kasus Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2), 89-102.
- Wulandari, R. (2023). *Strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Banyuwangi*. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.